



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR *328/KEP/2010*
TENTANG

HASIL VERIFIKASI, KLASIFIKASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN 2010

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk memperoleh data barang daerah yang benar, akurat serta bisa dipertanggungjawabkan telah dilakukan Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor : 22.1 Tahun 2010 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4855);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Tahun 2010, dengan Rekapitulasi Buku Induk Inventaris sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Hasil Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Buku Induk Inventaris Barang Milik Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menggambarkan jumlah barang milik daerah Hasil Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Tahun 2010; dan
 - b. Laporan Hasil Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Tahun 2010 per SKPD.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pimpinan DPRD Provinsi DIY;
2. Inspektur Provinsi DIY;
3. Semua Kepala SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 328/KEP/2010
TANGGAL 28 DESEMBER 2010

REKAPITULASI BUKU INDUK INVENTARIS
BARANG MILIK DAERAH (BMD) TAHUN 2010

NO	INSTANSI	KEADAAN PER-31/12/2009		HASIL VERIFIKASI, KLASIFIKASI DAN PENILAIAN	
		JUMLAH BARANG	NILAI BMD (RUPIAH)	JUMLAH BARANG	NILAI BMD (RUPIAH)
1	Sekretariat DPRD	6.926	577.643.396.978	6.779	577.739.491.847
2	Biro Tata Pemerintahan	676	1.086.558.050	678	1.086.558.050
3	Biro Hukum	5.733	1.206.034.879	5.733	1.206.034.879
4	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	279	253.290.500	285	660.791.500
5	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	173	210.072.076	211	587.985.076
6	Biro Administrasi Pembangunan	309	278.999.412	314	628.874.412
7	Biro Organisasi	300	634.880.300	290	603.334.680
8	Biro Umum, Humas dan Protokol	7.722	28.252.644.846	7.651	25.170.534.810
9	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan & Energi Sumber Daya Mineral	8.243	1.529.574.497.447	8.224	2.401.248.380.106
10	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.981	158.782.888.630	5.471	161.822.178.341
11	Dinas Kesehatan	10.678	49.639.970.996	10.275	50.485.783.536
12	RS Grhasia	6.784	23.207.671.176	6.813	23.623.260.804
13	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	31.106	213.567.089.540	31.736	262.240.624.277
14	Dinas Kebudayaan	85.465	41.054.799.691	87.271	49.554.827.738
15	Dinas Sosial	16.171	32.176.425.198	17.341	112.529.385.760
16	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	532	2.353.913.304	531	2.280.403.291
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	14.015	17.380.456.590	14.018	17.664.854.428

NO	INSTANSI	KEADAAN PER-31/12/2009		HASIL VERIFIKASI, KLASIFIKASI DAN PENILAIAN	
		JUMLAH BARANG	NILAI BMD (RUPIAH)	JUMLAH BARANG	NILAI BMD (RUPIAH)
18	Dinas Pertanian	9.081	106.133.440.889	9.135	95.504.982.122
19	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	637	2.443.255.430	625	2.454.094.894
20	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	6.860	55.388.290.474	6.850	57.553.051.283
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	15.758	30.214.597.296	11.248	37.883.653.093
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	6.011	32.812.832.740	6.075	26.568.459.086
23	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	6.768	259.175.857.693	6.920	276.462.536.017
24	Inspektorat Provinsi DIY	1.289	5.390.436.983	1.290	5.402.936.983
25	BAPPEDA	4.686	4.923.732.450	4.666	5.086.540.450
26	Badan Lingkungan Hidup	1.256	4.906.755.998	1.253	4.884.699.933
27	Dinas Pariwisata	503	6.518.153.112	464	6.818.545.624
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	1.352	2.933.060.400	1.031	2.834.582.400
29	Satuan Polisi Pamong Praja	637	967.811.500	863	1.175.509.500
30	Badan Kepegawaian Daerah	3.845	5.989.332.217	3.097	11.968.332.360
31	Badan Pendidikan dan Pelatihan	10.143	15.529.239.600	10.145	15.545.605.800
32	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	4.841	22.554.705.922	4.888	22.802.558.612
33	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	352.597	22.291.453.033	352.472	22.935.225.643
JUMLAH		626.357	3.255.476.545.350	624.643	4.285.014.617.335


 GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 HAMENGKU BUWONO X